

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Perdata dan Persekutuan Firma

Kode Etik Notaris

B. Referensi Buku

Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Kode Etik Notaris*. Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press. Yogyakarta.

-----, 2016. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Cetakan keempat. UII Press. Yogyakarta

Agus Yudha Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*. Kencana. Bandung.

Ashofa Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung.

Bagir Manan. 2004. *Hukum Positif Indonesia*. UII Press. Yogyakarta.

Chaidir Ali. 1987. *Badan Hukum*. Alumni. Bandung.

- CST Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Dewa Gede Admadja dan Nyoman Putu Budiarta. 2018. *Teori-teori Hukum*. Setara Press. Bandung.
- G.H.S Lumban Tobing. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Habib Adjie. 2020. *Tafsir, Penjelasan dan Komentar Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*. Bandung.
- Penafsiran Tematik, Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Herlin Budiono. 2009. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Buku Kedua. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- 2014. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- H.M.N. Purwosutjipto. 1982. *Pengertian Pokok Hukum Dagang (Bentuk-bentuk Perusahaan)*. Penerbit Djambatan. Cetakan ke 2. Jakarta.
- , 2007. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk-bentuk Perusahaan*. Cetakan Kesebelas. Djambatan. Jakarta.
- Janus Sidabalok. 2012. *Hukum Perusahaan, Analisis Terhadap Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012
- Jonny Ibrahim. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya. Bayumedia.
- Mulhadi. 2020. *Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Depok.
- Purwahid Patrik. 1994. *Dasar-dasar Hukum Perikatan*. Mandar Maju. Bandung.
- Philipus M. Hadjon. 1997. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Utama. Surabaya.
- Pitlo. 1986. *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. (Alih Bahasa M. Isa Arief). Intermasa, Jakarta.

- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rudhi Prasetya. 2002. *Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Cetakan Kesatu. PT. Raja Grafindo Persada.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)* Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Penerbit CV. Mandar Maju. Bandung.
- Supriadi. 2014. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Tan Thong Kie. 2000. *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*. Buku I. PT Ichtiar Baru Van Hoeve. Jakarta.

C. Referensi Internet

- Andria Fairuz Tuqa, Herlia, Damayanthi Prahastini Puteri Maarif, Kerjasama antar Notaris dalam Bentuk Persekutuan Perdata, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Februari 2019. Volume 2 Nomor 2.
- Habib Adjie, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik Berkaitan Dengan Pembuatan Akta Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, *Disertasi Program Pascasarjana Universitas Airlangga*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. 2007.
- Fitri Hidayat`s Blog, *Perlindungan Hukum Unsur Esensial Dalam Suatu Negara Hukum*, 31 Juli 2013, didownload pada 11 Februari 2022.
- Foni, Winner Sitorus dan Hasbir Perangin, Persekutuan Perdata Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, *Riau Law Journal*, Vol. 2, No. 1 Mei 2018.
- Galih Cakra Wiguna dan Mulyoto, Perbandingan Hukum Mengenai Maatschap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris serta implementasinya pada Notaris, *Jurnal Reperatorium*, Volume IV No. 2 Juli – Desember 2017.

- Herlien Budiono, *Peran, Fungsi dan Keberadaan Notaris Indonesia*, 24 September 2019, Notariat Unpas, 2019 <https://diy.ini.id/post/peran-fungsi-dan-keberadaan-notaris-indonesia-dr.-herlien-budiono-sh> diunduh pada 10 April 2022 Pukul 11. 15 WIB
- Inna Zakhina, Rachmad Safaat dan Istislam, *Karakteristik dan Persekutuan Perdata Notaris*, *Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang*, 2016.
- Hukum online.com, *Firma*, 2003, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/firma-cl1828>
- Niko Ramadhani, *Notaris : Peran, Fungsi dan Kewenangan*, 6 Januari 2021, di download pada <https://www.akseleran.co.id/blog/notaris-adalah/> diakses pada 6 Maret 2022 Pukul 07.00 WIB.
- Ronald Gultom. *Penetapan Honorarium Atas Jasa Hukum Notaris*, *Jurnal Universitas Hasanuddin*, 2017.
- Sulistiyono, *Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia di Tangerang*, [Eprints.undip.ac.id/18400/1/Sulistiyono](http://eprints.undip.ac.id/18400/1/Sulistiyono). Diunduh pada tgl 11 Februari 2022.
- Sulhan, *Pelaksanaan Kode Etik Dalam Menjalankan Jabatan Notaris*, *Jurnal Universitas Hasanuddin*, 2015.
- Zimry Boy Yoyada Sinuhaji, Abdul Rachman Budiono dan Lutfi Effendi, *Persekutuan Perdata menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Prinsip Kemandirian Notaris*, *Jurnal Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya*, 2016.
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/33377/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> (dikutip pada 26 Februari 2022, pukul 18. 32 WIB)
- <http://artonang.blogspot.com/2016/01/persekutuan-perdata-partnership.html> (dikutip pada 2 Maret 2022, pukul 18.40 WIB)
- <http://iptekindonesiaef.blogspot.com/2016/01/persekutuan-perdata-burgelijke-maatschap.html> (dikutip pada 26 Februari 2022, pukul 19.20 WIB)
- <https://kuliahonline.unikom.ac.id/?listmateri/&detail=2962&file=/Persekutuan-Perdata.html>, diunduh pada 10 Maret 2022 Pukul 05.30 WIB.

<https://www.studocu.com/id/document/universitashasanuddin/accounting/persekutuan-perdata/7623561>, diunduh pada 10 Maret 2022, Pukul 10.05 WIB.